

2022

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I 2022

PENGADILAN NEGERI SANGATTA



 <https://www.id.pn-sangatta.go.id>

 pn_sangatta@ymail.com

 (0549) 21324

PENGADILAN NEGERI SANGATTA

KELAS II

LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir 31 Juni 2022

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jalan Prof. Dr. Wirjonoprodjodikoro, S.H No. 1 Kawasan Perkantoran Bukit
Pelangi Sangatta – Kutai Timur

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas I mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Negeri Sangatta Kelas I. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sangatta, 01 Juli 2022

 Sekretaris,

SYAHRIDDIN, S.E.
NIP. 19780627 200904 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	21
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	26
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	29
F. Pengungkapan Penting Lainnya	32
VI. Lampiran - lampiran	35



PENGADILAN NEGERI SANGATTA Kelas II

Jl. Prof. Dr. Wirjono Projojodikoro, S.H, No. 1, Bukit Pelangi, Sangatta Telp.
0549-23273 Fax. 0549-21324
Kutai Timur - Kalimantan Timur 76511
pn-sangatta.go.id e-mail : pn_sangatta@ymail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Tahun Anggaran 2022 Periode Semester I sebagaimana terlampir, adalah merupakan fanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sangatta, 1 Juli 2022

Sekretaris,

SYAHRUDDIN, S.E.
NIP. 19780627 200904 1 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Tahun Anggaran 2022 Periode Semester I ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Juni 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Juni 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp3.295.497** atau mencapai **62.34** persen dari estimasi pendapatan sebesar **Rp5.286.000**.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Juni 2022 adalah sebesar **Rp2.089.737.185** atau mencapai **47,94** persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp4.358.956.000**.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Juni 2022.

Nilai Aset per 31 Juni 2022 dicatat dan disajikan sebesar **Rp7.974.846.370** yang terdiri dari : **Aset Lancar sebesar Rp. 56.340.900; Aset Tetap (neto) sebesar Rp7.974.846.370 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0.**

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp452.745.840** dan **Rp7.974.846.370**.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Juni 2022 adalah sebesar **Rp3.844.400**, sedangkan jumlah beban adalah sebesar **Rp.2.566.617.351** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai

(Rp.2.562.772.951). Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp2.562.772.654).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp7.998.431.496 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp2.562.772.654) kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp2.086.441.688 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Juni 2022 adalah senilai Rp7.522.100.530.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Juni 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan 31 Juni 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS I

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR

31 JUNI 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 Juni 2022		% thd Angg	31 Juni 2021		% thd Angg
		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI	
PENDAPATAN							
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	5.286.000	3.295.497	62,34	0	3,432,518	0
JUMLAH PENDAPATAN		5.286.000	3.295.497	62,34	0	3,432,518	0
BELANJA							
Belanja Operasional							
Belanja Pegawai	B.2	3.061.157.000	1.406.941.013	45,96	3.061.157.000	1.866.997.358	60,99
Belanja Barang	B.3	1.287.799.000	672.896.172	52,25	1.031.374.000	435.283.870	42,20
Jumlah Belanja Operasional		4.348.956.000	2.079.837.185	49,105	4.092.531.000	2.302.281.228	51,59
Belanja Modal							
Belanja Peralatan dan Mesin	B.4	10.000.000	9.900.000	99,00	334.500.000	37.500.000	11,21
Jumlah Belanja Modal		10.000.000	9.900.000	99,00	334.500.000	37.500.000	98,72
JUMLAH BELANJA		4.358.956.000	2.089.737.185	47,94	4.427.031.000	2.399.781.228	52,85

II. NERACA

PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS I

NERACA

PER 31 JUNI 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Juni 2022	31 Juni 2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	50.000.000	50.000.000
Persediaan	C.2	100.000	2.110.000
Persediaan belum diregister		0	0
Jumlah Aset Lancar		100.000	52.110.000
ASET TETAP			
Tanah	C.3	3.279.400.000	3.279.400.000
Peralatan dan Mesin	C.4	2.511.444.669	2.214.486.669
Gedung dan Bangunan	C.5	4.873.641.500	4.873.641.500
Aset Tetap Lainnya	C.6	27.517.047	27.327.047
Akumulasi Penyusutan	C.7	(2.775.397.796)	(2.551.308.791)
Jumlah Aset Tetap		7.918.505.420	7.843.546.425
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.8	4.900.000	4.900.000
Aset Lain-lain	C.9	49.531.000	49.531.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.10	(54.431.000)	(54.431.000)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
JUMLAH ASET		7.974.846.370	7.895.656.425
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka KPPN	C.11	50.000.000	50.000.000
Utang kepada Pihak Ketiga	C.12	397.054.090	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		452.745.840	50.000.000
JUMLAH KEWAJIBAN		452.745.840	35.855.517
EKUITAS			
Ekuitas	C.13	7.522.100.530	7.845.656.425
JUMLAH EKUITAS		7.522.100.530	7.845.656.425
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		7.974.846.370	7.895.656.425

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS I

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR

31 JUNI 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

URAIAN	CAT	31 Juni 2022	31 Juni 2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	3.844.400	3.432.500
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		3.844.400	3.432.500
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	1.764.614.222	1.838.912.233
Beban Persediaan	D.3	23.718.500	9.347.500
Beban Barang dan Jasa	D.4	347.763.643	266.516.318
Beban Pemeliharaan	D.5	286.969.154	106.278.297
Beban Perjalanan Dinas	D.6	26.888.580	43.277.363
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	116.663.252	112.942.603
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		2.566.617.351	2.377.274.314
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2.562.772.951)	(2.373.841.814)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8		
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		297	18
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		18	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		297	18
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(2.562.772.654)	(2.373.841.796)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS I

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 JUNI 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Juni 2022	31 Juni 2021
EKUITAS AWAL	E.1	7.998.431.496	7.883.149.511
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(2.562.772.654)	(2.373.841.796)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.4	0	0
Koreksi Lain-lain	E.3.5	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	2.086.441.688	2.336.348.710
EKUITAS AKHIR	E.5	7.522.100.530	7.845.656.425

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas I

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Pengadilan Negeri Sangatta merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum, sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Entitas berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H No. 01 Bukit Pelangi, Sangatta – Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Negeri Sangatta berkomitmen dengan visi Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Dan Misi Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparan badan peradilan.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan*

Laporan Keuangan Tahun 2022 Periode Semester I ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan

Keuangan Negeri Sangatta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas I menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas I dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai

perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Sangatta Kelas I. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas I adalah sebagai berikut :

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah rupiah).

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Juni 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2018 dan 2021. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset hasil

revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Piutang
Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung

ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Piutang Tak
Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan
Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014

tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrual
Pertama Kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas pada neraca per 31 Juni 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi

ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan
Rp3.295.497

B.1. Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2022 adalah sebesar **Rp 3.295.497** atau **62,4 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp5.286.000**. Pendapatan Pengadilan Negeri Sangatta terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN berupa pendapatan sewa rumah negara. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Per 31 Juni 2022*

Uraian	31 Juni 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (425131)	5.286.000	3.295.000	62,34
Pendapatan Lain – lain (425911)	-	0	0
Jumlah	6.500.000	6.796.368	104,5

Realisasi pendapatan 31 Juni 2022 mengalami kenaikan dibandingkan 31 Juni 2021.

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2022**

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Juni 2021 dan 31 Juni 2022*

URAIAN	REALISASI 31 Juni 2022	REALISASI 31 Juni 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (42314)	0	0	0,00
Pendapatan Lain – lain (425911)	0	0	0,00
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (42513)	3.295.497	3.432.518	0,00
Penerimaan Kembali Persekot / Uang Muka Gaji	0	0	0,00
Jumlah	3.295.497	3.432.518	(7,9)

B.2. Belanja

Realisasi Belanja
Negara
Rp2.089.737.185

Realisasi belanja Pengadilan Negeri Sangatta pada 31 Juni 2022 adalah sebesar Rp2.089.737.185 atau 47,94 persen dari anggaran belanja sebesar Rp4.358.956.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja
Per 31 Juni 2021 dan 31 Juni 2022*

Uraian	31 Juni 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Belanja Pegawai	3.061.157.000	1.406.941.013	45,96
Belanja Barang	1.287.799.000	672.896.172	52,25
Belanja Modal	10.000.000	9.900.000	99,00
Jumlah Belanja Kotor	4.587.142.000	2.089.737.185	47,94
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	4.587.142.000	2.089.737.185	47,94

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2022**

Perbandingan Realisasi Belanja

Per 31 Juni 2022 dan 2021

URAIAN	ANGGARAN N	REALISASI 31 Juni 2022	ANGGARAN	REALISASI 31 DES 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3.061.157.000	1.406.941.013	3.061.157.000	1.866.997.358	(15,03)
Belanja Barang	1.287.799.000	672.896.172	1.031.374.000	435.283.870	10
Belanja Modal	10.000.000	9.900.000	334.500.000	37.500.000	87,79
Jumlah	4.358.956.000	2.089.737.185	4.427.031.000	2.339.781.228	4,91

Belanja Pegawai
Rp1.406.941.013

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 1.406.941.013 dan Rp 1.866.997.358.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai

Per 31 Juni 2022 dan 31 Juni 2021

URAIAN	REALISASI 31 JUN 2022	REALISASI 31 JUN 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	484.419.280	596.492.720	(10,4)
Belanja Pembulatan	8.922	10.171	(5,94)
Belanja Tunj. Suami / Istri	32.024.030	39.046.560	(8,77)
Belanja Tunj. Anak	8.857.784	12.146.848	(14,96)
Belanja Tunj. Struktural	12.600.000	16.080.000	(9,75)
Belanja Tunj. Fungsional	614.250.000	878.405.000	(22,63)
Belanja Tunj. Pph PNS	69.620.337	117.296.759	(24,3)
Belanja Tunj. Beras	27.012.660	33.675.300	(11,37)
Belanja Uang Makan	87.308.000	85.924.000	0,58
Belanja Tunj. Umum	6.040.000	4.220.000	7,04
Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	64.800.000	83.700.000	(11,67)
Belanja Lembur	0	0	0,00
Jumlah Belanja Pegawai Kotor	1.406.941.013	1.866.997.338	(15,03)
Pengembalian Belanja Pegawai	0		0

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2022**

Jumlah Belanja Pegawai	1.406.941.013	1.866.997.338	(15,03)
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------

Belanja Barang
Rp1.287.799.000

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Juni 2022 dan Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 672.896.172 dan Rp435.283.870

*Perbandingan Realisasi Belanja Barang
Per 31 Juni 2022 dan 2021*

URAIAN	REALISASI 31 Des 2022	REALISASI 31 Des 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	284.832.444	210.390.100	5,91
Belanja Barang Persediaan	23.718.500	11.411.500	38,38
Belanja Jasa	50.437.494	63.336.610	(7,27)
Belanja Pemeliharaan	287.019.154	106.278.297	28,01
Belanja Barang Non Operasional	0	560.000	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	26.888.580	43.277.363	(22,28)
Jumlah Belanja Barang Kotor	1.017.632.874	435.283.870	10,01
Pengembalian Belanja Barang	0	0	
Jumlah Belanja Barang	672.896.172	435.283.870	10,01

Belanja Modal
Rp.9.900.000

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Juni 2021 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.9.900.000 dan Rp37.500.000.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Per 31 Juni 2022 dan 31 Juni 2021*

URAIAN	REALISASI 31 Juni 2022	REALISASI 31 Des 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2022**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.900.000	37.500.000	87,79
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	0	0	
Jumlah Belanja Modal	9.900.000	37.500.000	87,79

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp.50.000.000

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Juni 2022 dan 31 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp50.000.000 dan Rp.50.000.000. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	31 Juni 2022	31 Juni 2021
BPG 046 PENGADILAN NEGERI SANGATTA 653256629861000	0	0
Uang Tunai	50.000.000	50.000.000
Kuitansi UP	0	0
Jumlah	0	0

Persediaan
Rp.100.000

C.2. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp100.000 dan Rp2.110.000.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2022**

dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Juni 2022 dan 31 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan :

Persediaan	31 Juni 2022	31 Juni 2021
Barang Konsumsi	100.000	2.110.000
Jumlah	100.000	2.110.000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah
Rp3.279.400.000

C.3. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Negeri Sangatta Kelas I per 31 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.279.400.00 dan Rp3.279.400.000.

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang atas aset tetap tanah per 31 Juni 2022.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Juni 2022	3.279.400.000
Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	0
Saldo per 31 Juni 2022	3.279.400.000
Akumulasi penyusutan s.d. 31 Juni 2022	0
Nilai Buku per 31 Juni 2022	3.279.400.000

Rincian saldo Tanah per 31 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	9.245 m2	Jl. Prof. Dr. Wirjonoprodjodikoro, SH No. 01 Sangatta	2.773.500.000
2	700 m2	Jl. Soekarno Hatta Komp Perumahan Dewa Ruci Sangatta	505.900.000
Jumlah			3.279.400.000

Peralatan dan Mesin
Rp2.521.344.669

C.4. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.521.344.669 dan Rp2.214.486.669.

Terdapat mutasi tambah berupa belanja modal peralatan dan mesin dan tidak terdapat mutasi kurang pada aset tetap peralatan dan mesin per 31 Juni 2022.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Juni 2022	334.458.000
Mutasi Tambah :	9.900.000
- Pembelian	9.900.000
- Hibah Masuk	0
Mutasi Kurang :	0
Saldo per 31 Juni 2022	2.521.344.669
Akumulasi penyusutan s.d. 31 Juni 2022	(2.164.352.022)
Nilai Buku per 31 Juni 2022	2.521.344.669

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Rp4.873.641.500

C.5. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.873.641.500 dan Rp4.873.641.500

Tidak terdapat mutasi tambah berupa belanja modal Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan dan tidak terdapat mutasi kurang pada aset tetap gedung dan bangunan per 31 Juni 2021.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Juni 2022	4.873.641.500
Mutasi Tambah :	0
- Pembelian	0

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2022**

Mutasi Kurang :	0
Saldo per 31 Juni 2022	4.873.641.500
Akumulasi penyusutan s.d. 31 Juni 2022	(611.045.774)
Nilai Buku per 31 Juni 2021	4.873.641.500

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp19.517.047

C.6. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp27.517.047 dan Rp. 0.

Terdapat mutasi kurang pada aset tetap lainnya per 31 Juni 2022 dikarenakan penyusutan .

Mutasi transaksi terhadap Aset tetap lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Juni 2022	0
Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	0
Saldo per 31 Juni 2022	27.517.047
Akumulasi penyusutan s.d. 31 Juni 2021	8.000.000
Nilai Buku per 31 Juni 2022	19.517.047

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp2.783.397.776

C.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.783.397.776 dan Rp2.551.308.791:

Aset Tak Berwujud
Rp4.900.000

C.8. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.900.000 dan Rp4.900.000. Aset tak berwujud ini merupakan Antivirus Kaspersky dengan lisensi selama 2 (dua) tahun.

Aset Lain-lain
Rp49.531.000

C.9. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp49.531.000 dan Rp49.531.000. Aset lain-lain ini berasal dari BMN yang dihentikan penggunaannya dan saat ini sedang diajukan usulan permohonan penghapusan kepada Pengguna Barang.

Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi
i Aset Lainnya
Rp54.431.000

C.10. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp54.431.000 dan Rp54.431.000.

Uang Muka dari
KPPN Rp50.000.000

C.11. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 50.000.00 dan Rp50.000.000. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp397.054.090

C.12. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp397.054.090 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar

dan merupakan kewajiban yang harus diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Hibah yang belum disahkan Rp0

C.13. Hibah yang belum disahkan

Pada pelaporan Semester I Tahun 2022 Satker Pengadilan Negeri Sangatta Kelas I tidak ada saldo hibah yang belum disahkan.

Ekuitas
Rp7.522.100.530

C.14. Ekuitas

Ekuitas per 31 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp7.522.100.530 dan Rp7.845.656.425. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBPN
Rp3.844.400

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.844.400 dan Rp3.432.500. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
per 31 Juni 2022 dan 2021*

Uraian	31 Jun 2022	31 Des 2021
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	3.844.400	3.432.500.
Jumlah	3.844.400	3.432.500.

Beban Pegawai
Rp1.764.614.222

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.764.614.222 dan Rp1.838.912.233. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah yang belum

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2022**

berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai

Per 31 Juni 2022 dan 31 Juni 2021

URAIAN	REALISASI 31 JUN 2022	REALISASI 31 JUN 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	484.419.280	596.492.720	(10,4)
Belanja Pembulatan	8.922	10.171	(5,94)
Belanja Tunj. Suami / Istri	32.024.030	39.046.560	(8,77)
Belanja Tunj. Anak	8.857.784	12.146.848	(14,96)
Belanja Tunj. Struktural	12.600.000	16.080.000	(9,75)
Belanja Tunj. Fungsional	614.250.000	878.405.000	(22,63)
Belanja Tunj. Pph PNS	69.620.337	117.296.759	(24,3)
Belanja Tunj. Beras	27.012.660	33.675.300	(11,37)
Belanja Uang Makan	87.308.000	85.924.000	0,58
Belanja Tunj. Umum	6.040.000	4.220.000	7,04
Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	64.800.000	83.700.000	(11,67)
Belanja Lembur	0	0	0,00
Jumlah Belanja Pegawai Kotor	1.406.941.013	1.866.997.338	(15,03)
Pengembalian Belanja Pegawai	0		0
Jumlah Belanja Pegawai	1.406.941.013	1.866.997.338	(15,03)

Beban Persediaan
Rp23.718.500

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp23.718.500 dan Rp9.347.500. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Barang dan Jasa
Rp347.763.643

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp347.763.643 dan

Rp266.516.318. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Beban
Pemeliharaan
Rp286.969.154

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.286.969.154 dan Rp106.278.297. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada dalam kondisi normal.

Beban Perjalanan
Dinas Rp26.888.580

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp69.180.000 dan Rp43.277.363. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
Per 31 Juni 2021 dan 2022*

Uraian Jenis Beban	31 Juni 2022	31 Juni 2021
Beban Perjalanan Dinas	26.888.580	Rp43.277.363.
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0
Jumlah	26.888.580	43.277.363.

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp.116.663.252

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp116.663.252 dan Rp112.942.603. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi karena adanya penyusutan untuk aset tetap dan amortisasi untuk aset tak berwujud.

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2022**

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp(297)

D.8. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional
31 Juni 2021 dan 2022*

Uraian	31 Juni 2022	31 Juni 2021
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0
Jumlah Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	297	18
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	18	0
Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	18	18

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp7.998.431.496

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp7.998.431.496 dan Rp7.883.149.511

Defisit LO
Rp2.562.772.654

E.2. Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2022 dan Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.562.772.654 dan Rp2.373.841.796. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

E.3.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk Periode yang berakhir pada 31 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Jumlah	0

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset

Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Selisih revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas tanah, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan berupa jalan jembatan dan bangunan air.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Tanah	0
Gedung dan Bangunan	0
Jumlah	0

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp0

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Uraian	Nilai Koreksi (Rp)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0
Jumlah	0

Koreksi Lain-
lain Rp0

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2022 dan 2021 adalah Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-lain

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi Hibah	0
Jumlah	0

Transaksi Antar
Entitas
Rp2.086.441.688

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Juni 2022 dan Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.086.441.688 dan Rp2.336.348.710.

Ekuitas Akhir
Rp7.522.100.530

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Juni 2022 dan Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp7.999.297.346 dan Rp7.845.656.425.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan semester lalu maupun pada Laporan Keuangan tahun lalu.

F.2. INFORMASI AKRUAL

Informasi akrual pada laporan keuangan per 31 Juni 2022 terdapat utang kepada pihak ketiga sebesar Rp.26.071.326

F.3. REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Sangatta Kelas I adalah:

1. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangatta 653256629861000 a.n. BPG 046 PENGADILAN NEGERI SANGATTA 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Juni 2022 sebesar Rp36.596.000.

F.4. REVISI DIPA

Hingga tanggal 31 Juni 2022, Pengadilan Negeri Sangatta melakukan Revisi DIPA sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian:

1. Revisi 1 pada tanggal 17 Februari 2022.

F.5. RALAT SPM, SP2D, SSBP DAN SSPB

Hingga tanggal 31 Juni 2022, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas I belum pernah melakukan ralat SP2D

F.6. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 42/PA/SK/XI/2018 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun Anggaran 2022, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Sangatta tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Staf Pengelola Keuangan pada Pengadilan Negeri Sangatta dan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Sangatta tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Pengadilan Negeri Sangatta Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran : Syahrudin, SE.

Pejabat Pembuat Komitmen : Syahrudin, SE

Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM : Arini Widiastuti, S.I.P.

Bendahara Pengeluaran : Muhamad Rodansa , S.I.P.

Bendahara Penerima

: Aisyah, S.H., M.H.

2. Hingga 31 Juni 2022, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas I telah merealisasikan belanja modal sebesar Rp9.900.000,- atau 99 % dari total anggaran sebesar Rp.10.000.000
3. Dalam upaya pencegahan penyebaran virus covid-19, hingga 31 Juni 2022 Pengadilan Negeri Sangatta telah merealisasikan belanja barang operasional penanganan pandemi covid-19 sebesar Rp1.779.900,- . atau sebesar 32,96% dari total anggaran yang berjumlah Rp.5.400.000,-.

G. LAMPIRAN – LAMPIRAN

2022

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I

PENGADILAN NEGERI SANGATTA



 <https://www.id.pn-sangatta.go.id>

 pn_sangatta@ymail.com

 (0549) 21324

PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir 31 Juni 2022

BAGIAN ANGGARAN 005.03

BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Prof. Dr.Wirjono Prodjodikoro, S.H No. 01 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi

SANGATTA – KUTAI TIMUR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Negeri Sangatta. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sangatta, 01 Juli 2022


Sekretaris,
Syahrudin, SE.
NIP 19780627 200904 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	15
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	17
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	19
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	20
F. Pengungkapan Penting Lainnya	23
G. Lampiran Lampiran	25



PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

Jl. Prof. Dr. Wirjono Projodjodikoro, S.H, No. 1, Bukit Pelangi, Sangatta Telp. 0549-23273 Fax. 0549-21324

Kutai Timur - Kalimantan Timur 76511

Id.pn-sangatta.go.id e-mail : pn_sangatta@ymail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sangatta, 01 Juli 2022

Sekretaris

Syahrudin, SE.
NIP 19780627 200904 1 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II T Semester I Tahun Anggaran 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Juni 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Juni 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp10.090.500 atau mencapai 50,41 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp20.015.000.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Juni 2022 adalah sebesar Rp43.723.550. atau mencapai 36,02 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp121.392.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Juni 2022.

Nilai Aset per 31 Juni 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp10.534.000 yang seluruhnya merupakan Aset Lancar.

Terdapat Nilai Kewajiban sebesar Rp. 18.026.000 dan per 31 Juni 2022 Ekuitas sebesar Rp7.492.000.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Juni 2022 adalah sebesar Rp10.090.500, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp57.548.974 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp47.458.474). Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp47.458.474).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp118.000 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp47.458.474) kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp39.848.474 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Juni 2022 adalah senilai Rp7.492.000.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Juni 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Juni 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN NEGERI SANGATA KELAS II

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR

31 Juni 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Juni 2022		% thd Angg	31 Juni 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	20.015.000	10.090.500	50,41	18.835.500
JUMLAH PENDAPATAN		20.015.000	10.090.500	50,41	18.835.500
BELANJA					
Belanja Operasi					
Belanja Barang	B.2	121.392.000	43.723.550	36,02	53.898.000
Jumlah Belanja Operasi		121.392.000	43.723.550	36,02	53.898.000
JUMLAH BELANJA		121.392.000	43.723.550	36,02	53.898.000

II. NERACA

PENGADILAN NEGERI SANGATA KELAS II

NERACA

PER 31 JUNI 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Juni 2022	31 Juni 2021
ASET			
ASET LANCAR			
Persediaan	C.1	118.000	49.000
Jumlah Aset Lancar		118.000	13.000
JUMLAH ASET		10.534.000	10.049.000
EKUITAS			
Ekuitas	C.3	(7.492.000)	49.000
JUMLAH EKUITAS		(7.492.000)	49.000
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		10.534.000	10.049.000

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN NEGERI SANGATA KELAS II

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 JUNI 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Juni 2022	31 Juni 2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	10.090.500	13.835.500
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		10.090.500	20.014.300
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Persediaan	D.2	15.970.424	16.587.338
Beban Barang dan Jasa	D.3	31.678.550	36.995.000
Beban Perjalanan Dinas	D.4	9.900.000	6.750.000
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		57.548.974	60.332.338
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(47.458.474)	(46.496.838)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	D.5	0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(47.458.474)	(46.496.838)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN NEGERI SANGATA KELAS II

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 JUNI 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Juni 2022	31 Juni 2021
EKUITAS AWAL	E.1	118.000	13.000
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(47.458.474)	(46.496.838)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS *)	E.4	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.4	0	0
Koreksi Lain-lain	E.4.5	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	39.848.474	46.519.838
EKUITAS AKHIR	E.6	(7.492.000)	49.000

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum, sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Entitas berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Wirjonoprodjodikoro, SH No 01 – Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Negeri Sangatta berkomitmen dengan visi Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Dan Misi Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparan badan peradilan.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Meningkatnya kualitas pengawasan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Sangatta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian

Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Sangatta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Kebijakan
Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 31 Juni 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Sangatta. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah sebagai berikut :

Pendapatan
-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan
-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp310.000 (tiga ratus ribu rupiah).
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak

kesenian.

*Piutang
Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan

penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

*Piutang Tak
Tertagih*

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan
Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrual
Pertama Kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas pada neraca per 31 Juni 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Realisasi
Pendapatan
Rp10.090.500.*

B.1. Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2022 adalah sebesar Rp10.090.500 atau 50,41 persen dari estimasi

pendapatan sebesar Rp20.015.000. Pendapatan Pengadilan Negeri Sangatta seluruhnya merupakan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan, pendapatan ongkos perkara, pendapatan uang meja leges.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Juni 2022

Uraian	31 Juni 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan, Pendapatan Ongkos Perkara, Pendapatan Uang Meja Leges.	Rp20.015.000	10.090.500	50,41
Jumlah	Rp20.015.000	10.090.500	50,41

Realisasi pendapatan per 31 Juni 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.745.000 atau 29,6 persen dibandingkan 31 Juni 2021.

Perbandingan Realisasi Pendapatan

31 Juni 2022 dan 31 Juni 2021

URAIAN	REALISASI 31 Juni 2022	REALISASI 31 Juni 2021	NAIK (TURUN) Rp	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan, Pendapatan Ongkos Perkara, Pendapatan Uang Meja Leges.	10.090.500	13.835.500	3.745.000	29,6
Jumlah	10.090.500	13.835.500	3.745.000	29,6

B2. Belanja

Realisasi Belanja
Negara
Rp.43.723.550

Realisasi belanja Pengadilan Negeri Sangatta per 31 Juni 2022 adalah sebesar Rp43.723.550 atau 36,02 persen dari anggaran belanja sebesar Rp121.392.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 31 Juni 2022

Uraian	31 Juni 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Belanja Barang	121.392.000	43.723.550	36,02
Jumlah Belanja Kotor	121.392.000	43.723.550	36,02
Pengembalian Belanja	0	0	
Jumlah	121.392.000	43.723.550	36,02

Realisasi Belanja Barang 31 Juni 2022 dan Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 43.723.550 dan Rp53.898.000.

Belanja Barang
Rp43.723.550

URAIAN	REALISASI 31 Des 2022	REALISASI 31 Des 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	43.723.550	53.898.000	8,38
Jumlah Belanja Barang	43.723.550	53.898.000	3,38

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp10.000.000

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Juni 2022 dan 31 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp10.000.000 dan Rp.10.000.000. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	31 Juni 2022	31 Juni 2021
BPG 046 PENGADILAN NEGERI SANGATA 03 654446629871000	0	0
Uang Tunai	10.000.000	0
Kuitansi UP	0	0
Jumlah	10.000.000	10.000.000

Kas
Bendahara
Penerima Rp0

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerima per 31 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Persediaan
Rp118.000.

C.3. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp118.000 dan Rp49.000

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	31 Juni 2022	31 Juni 2021
Barang Konsumsi	118.000	49.000
Jumlah	118.000	49.000

Uang Muka dari
KPPN
Rp10.000.000

C.4. Uang Muka dari KPPN

Tidak terdapat Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Juni 2022 dan 2021.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Ekuitas

Rp10.534.000

C.5. Ekuitas

Ekuitas per 31 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp(10.534.000) dan Rp10.049.000. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp10.090.500

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp10.090.500 dan Rp13.835.500

Beban

Persediaan

Rp15.970.424

D.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp15.970.424 dan Rp16.587.338. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Barang dan Jasa

Rp31.678.550

D.3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp31.678.550 dan Rp36.995.000. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Beban

Perjalanan Dinas

Rp9.900.000

D.4. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp9.900.000 dan Rp6.750.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka

pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya Rp0

D.5. Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. **Surplus** dari Kegiatan Non Operasional 31 Juni 2021 dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Juni adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp118.000

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp118.000 dan Rp.13.000

Defisit LO
(Rp47.458.474)

E.2. Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp47.458.474) dan (Rp.46.496.838). Defisit LO merupakan selisih /kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

E.3.

Penyesuaian
Nilai Aset Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk Periode yang berakhir pada 31 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp13.000 dan Rp0 Koreksi Nilai Persediaan pada 31 Juni 2021 sebagai akibat dari kesalahan

pencatatan persediaan berupa buku-buku register, yang seharusnya menjadi Saldo Awal 31 Juni 2022 namun dicatat sebagai transaksi Transfer Masuk. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Jumlah	0

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2022 dan 31 Juni 2021 adalah sebesar Rp0.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Koreksi Nilai Saldo Awal	0
Jumlah	0

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp0

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2022 dan 31 Juni 2021 adalah sebesar Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan

karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-lain
Rp0

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2022 dan 2021 adalah Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-lain

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi Hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
Rp39.848.474

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp39.848.474 dan Rp46.519.838

Ekuitas Akhir
Rp7.492.000

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp7.492.000 dan Rp49.000

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan semester lalu maupun pada Laporan Keuangan tahun lalu.

F.3. INFORMASI AKRUAL

Tidak terdapat informasi akrual pada laporan keuangan per 31 Juni 2022

F.4. REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah:

1. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangatta A/C 654446629871000 a.n. BPG 046 PENGADILAN NEGERI SANGATA yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 31 Juni sebesar Rp0.

F.5. REVISI DIPA

Hingga tanggal 31 Juni 2022, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II belum melakukan Revisi.

F.6. RALAT SPM, SP2D, SSBP DAN SSPB

Hingga tanggal 31 Juni 2022, Pengadilan Negeri Sangatta tidak ada melakukan Rlat SPM, SP2D, SSBP Dan SSPB.

F.7. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 42/PA/SK/XII/31 Juni 2018 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun Anggaran 2019, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran

Pengadilan Negeri Sangatta tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Staf Pengelola Keuangan pada Pengadilan Negeri Sangatta dan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Sangatta tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Pengadilan Negeri Sangatta Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran : Syahrudin, SE.

Pejabat Pembuat Komitmen : Syahrudin, SE.

Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan : Arini Widiastuti, S.IP.

SPM

Bendahara Pengeluaran : M. Rodansa, S.I.P.

Bendahara Penerima : Aisyah, S.H., M.H.

G . lampiran lampiran